

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan keuangan yang dihasilkan adalah sebagai bentuk pertanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki yang dapat disajikan berupa informasi keuangan. Laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi keuangan serta hasil dari proses akuntansi dalam suatu periode tertentu dan berfungsi sebagai sarana komunikasi bagi pihak yang berkepentingan (Padang, 2022). Oleh sebab itu, Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disajikan harus memiliki kualitas tinggi, baik dari segi informasi maupun penyusunannya, agar laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam penyusunannya, pengelolaan keuangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi kriteria andal, relevan, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan. Adapun bentuk laporan keuangan pemerintah daerah meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

*Teori Stewardship* merupakan suatu situasi yang dimana pemerintah daerah tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu akan tetapi lebih ditujukan pada hasil utama mereka yang untuk kepentingan organisasi (Alumbida, Saerang, & Ilat, 2016). Implikasi *Teori Stewardship* dalam penelitian ini adalah mampu menjelaskan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga yang dapat dipercaya, memberikan pelayanan yang optimal kepada publik, menampung aspirasi masyarakat, serta menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan amanah yang diterima. Hal ini, bertujuan agar ekonomi dapat tercapai, dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara maksimal (Indrayani & Widiastuti, 2020).

Menurut penelitian terdahulu oleh Islamay and Trisnaningsih (2022) dalam penggunaan sistem informasi akuntansi daerah tidak memberi dampak yang berarti atas kualitas pelaporan keuangan. Jika dilihat yang terjadi dilapangan sistem informasi akuntansi terlihat sudah diadakan dengan sebaik mungkin. Tetapi pada fakta dilapangan pemerintah belum sepenuhnya mempertinggi nilai efektivitas, relevan, efisiensi dan transparan dalam sebuah informasi. Sistem informasi akuntansi yang dipakai untuk keuangan daerah belum efektif dalam membuat keakuratan sebuah laporan keuangan. Hal yang sama menurut Nasution and Si (2021), dalam penerapan SIPD masih terjadi berbagai kendala, seperti seringnya terjadi kesalahan sistem, kurangnya koordinasi antar pengguna, serta kesalahan input yang disebabkan oleh beberapa menu yang masih perlu dilengkapi, sehingga laporan yang dihasilkan menjadi kurang maksimal. Selain itu, terdapat

keterlambatan dalam menyusun anggaran, hambatan dalam sistem penggajian, serta kendala dalam penyusunan anggaran kas dan pembuatan dokumen seperti SPD, SPJ, SPP, SPM, dan SP2D.

Permasalahan ini diperkuat oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembina daerah, yang menerbitkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini semakin ditegaskan dalam Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 903/235/Keuda Tahun 2021, yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk mengintegrasikan atau menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai aplikasi umum dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun, hasil evaluasi Kemendagri menunjukkan bahwa 26% pemerintah daerah masih belum sepenuhnya menerapkan SIPD. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala dan hambatan yang belum dapat diatasi, seperti masalah jaringan, kendala teknis dalam aplikasi, dan lainnya. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengidentifikasi sejumlah permasalahan pada SIPD, di antaranya ketidaksesuaian dengan kebutuhan pemerintah daerah, lemahnya pengendalian aplikasi, kurangnya integrasi antara SIPD dengan aplikasi lain di pemerintah daerah, serta validasi keandalan yang belum memadai. Akibatnya, terdapat risiko tinggi terhadap kegagalan integrasi, ketidakterpaduan data, serta ketidakakuratan informasi keuangan daerah (Arif & Firmansyah, 2024).

Selain itu, Kualitas Laporan Keuangan juga dipengaruhi oleh salah satu faktor lain yaitu pengendalian internal. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008,

pengendalian internal sangat penting dalam menunjang perbaikan pemerintah daerah dan merupakan faktor pendukung untuk pencapaian pemerintah yang akuntabel dan transparan sebagai cerminan dari kinerja yang baik. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang buruk dan penyajian yang belum dapat diharapkan secara wajar, salah satunya bisa disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal (Mamuaja, 2016). Pengendalian internal diperlukan untuk mempermudah dalam mengidentifikasi serta menganalisis berbagai permasalahan yang mungkin muncul selama proses pencapaian tujuan. Dengan adanya pengendalian internal, pencapaian tujuan dapat dipantau secara lebih jelas, termasuk dalam hal kesalahan administrasi maupun pengelolaan keuangan yang kurang optimal. Keterbaruan penelitian ini terletak pada penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan implementasi SIPD yang baik sangat penting dan telah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Tugiman, Ifa Ratifah, & MSi, 2023).

Dengan demikian, Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto?

## 1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis seberapa pengaruh penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk menganalisis seberapa pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto.

## 1.4 Manfaat

Adapun beberapa manfaat penelitian ini:

### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu karya penelitian yang baru dan dapat mendukung dalam pengembangan akuntansi sektor publik. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya dengan mengaplikasikan teori yang sudah didapat selama studi diperguruan tinggi maupun internet.

### 2. Secara Praktis

Bertujuan untuk tambahan pengetahuan dan dapat mengetahui atau mempelajari masalah-masalah yang terkait serta sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto mengenai pengaruh penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan pembahasan yang dikemukakan.